

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah :

**Tabel : 1**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>	<b>KATEGORI CAPAIAN</b>
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

### **3.2 EVALUASI KINERJA**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial sebagaimana Visi dan Misi telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mengukur pencapaian visi dan misi tersebut.

Adapun sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kedua meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya Hasil capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut :

## 1. Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

### a Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis ini. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel : 2  
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	8,30	7,81	93
	% PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0,17	0,17	100
	% PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	1,79	1,83	102,23
	% PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	4,41	4,41	100
	% PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0,54	0,54	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran "meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS" pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil pengukuran 5 indikator yaitu sebagai berikut :

1. **Indikator Pertama** : persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 397.607 KPM atau 8.30 % dari populasi penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.798.120 jiwa, sampai dengan akhir tahun 2017 terealisasi sebanyak 374.048 KPM atau 7.81 % dengan capaian kinerja 94,09 % (kategori "**baik**").

Capaian kinerja ini secara signifikan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur dimana sesuai data BPS jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 4.617.01 ribu jiwa atau 11,77 % turun menjadi 4.405.27 ribu jiwa atau 11,20 %, angka kemiskinan di Jawa Timur turun sebesar 0,57 %. Dibandingkan dengan capaian nasional, dimana angka kemiskinan turun sebesar 0,52 % pada September 2017 maka capaian Jawa Timur melampaui/diatas Nasional. Capaian pada indikator ini dicapai melalui pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial (dukungan program ad hoc Gubernur Jawa Timur melalui penyaluran Bantuan Beras Bersubsidi / TUAN RASIDI). Dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 3000 jiwa, maka capaian kinerja tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah PMKS di Jawa Timur.

Selain itu, pencapaian kinerja tersebut juga mendapat dukungan dari Kementerian Sosial RI melalui pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2017 dapat menjangkau sebanyak 1.300 keluarga miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan.

2. **Indikator kedua**, persentase PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Pada tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 1.138 jiwa atau 0,17 % dari populasi PMKS

kelompok rehabilitasi sosial seperti Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Anak jalanan, Gelandangan Psikotik, Penyandang disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Korban Pasung Psikotik dan Anak nakal/ Korban Napza serta Eks Warga Binaan Pemasyarakatan dengan jumlah sebanyak 677.025, terealisasi sebanyak 1.138 jiwa atau 0,168 % atau 0,17 % dengan capaian kinerja 100 % (kategori "**baik**"). Pada tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan penanganan PMKS dari Kementerian Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial dengan tujuan membantu agar terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya, dengan jangkauan penanganan sebanyak 6.105 orang (Lanjut Usia : 940 orang, Anak Terlantar : 4.950 orang, Tuna Sosial : 70 orang, Orang dengan Disabilitas : 130 orang, dan Napza : 15 orang).

3. **Indikator ketiga**, Persentase PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh data bahwa pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 1,79 % atau 2.260 orang, terealisasi sebanyak 2.315 orang atau 1,83 % dengan capaian kinerja sebesar 102,23 % (kategori "**sangat baik**"). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 1,73 % dari total populasi PMKS rumpun Program Bantuan dan Perlindungan Sosial sebanyak 126.581 jiwa (telah melampaui target Renstra yang telah ditetapkan).
4. **Indikator keempat**, persentase PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel 2 diatas diperoleh data bahwa

pada tahun 2017 ini ditargetken sebesar 4.41 % atau 76 orang, terealisasi sebanyak 76 orang atau 4.41 % dari jumlah eks klien sebanyak 1.724 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori "**baik**"). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 mengalami kenaikan, dimana tahun 2016 capaian kinerja sebesar 2,90 % dan tahun 2017 sebesar 4,41 % (naik sebesar 1,51 %). Kenaikan tahun 2017 disebabkan karena adanya dukungan dari daerah, manajemen pelayanan yang lebih baik juga partisipasi PSKS di daerah. Sedangkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 320 orang atau 18,56 % dari total eks klien UPT sebanyak 1.724 jiwa, maka capaian terhadap target Renstra sebesar 23,76 %.

5. **Indikator kelima**, PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dalam tabel 2 diperoleh hasil pengukuran bahwa pada tahun 2017 ini ditargetken sebesar 0,75 % atau 4.880 orang, terealisasi sebanyak 4.880 orang atau 0,75 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori "**baik**"). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2016 dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,54 % dari total populasi PMKS sebanyak 906.827 jiwa, maka dapat tercapai sebesar 100 %. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial.

b Perbandingan Capaian Kinerja

Salah aspek yang digunakan untuk melihat capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016, sehingga dapat diketahui perbandingan capaian kinerja dimana informasi tersebut sangat bermanfaat untuk bahan masukan penyusunan kebijakan

pembangunan kesejahteraan sosial di tahun mendatang. Selengkapnya perbandingan kinerja dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel : 3  
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	
			Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	8.30	0,02	7,81
	% PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0.17	0,19	0.17
	% PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	1.79	1.60	1,83
	% PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Usaha Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	4.41	2,90	4.41
	% PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0.54	0,54	0,75

Memperhatikan tabel 3 tentang perbandingan capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indikator pertama**, persentase PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, dibandingkan dengan capaian kinerja (n-1) tahun 2016 sebesar 0,02 % atau 820 KK, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 7.81 %, atau mengalami kenaikan. Hal ini terkait dengan

kebijakan Peningkatan capaian program karena pengalokasian atau ketersediaan anggaran yang cukup untuk menangani Keluarga Fakir Miskin sebanyak 374.048 jiwa (program regular dan program ad hoc Gubernur Jawa timur tahun 2017). Capaian ini juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah PMKS di Jawa Timur.

Selain pendanaan dari APBD, Dinas Sosial Provinsi terkait dengan penanganan Fakir Miskin juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial RI melalui Dekon APBN yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial Fakir miskin dengan 800 KK untuk penanganan kemiskinan perdesaan dan 500 KK untuk penanganan kemiskinan perkotaan.

2. **Indikator kedua**, persentase PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, capaian kinerja pada indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1) mengalami penurunan. Dimana tahun 2016 (n-1) ini mencapai 0,19 %, kemudian pada tahun 2017 mencapai 0.17 %.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 mengalami perubahan/penurunan. Dimana tahun 2016 capaian kinerja sebesar 0,19 % dan tahun 2017 mencapai 0,17 %. Hal ini terjadi karena adanya penurunan target terkait dengan penurunan populasi PMKS rumpun Rehabilitasi Sosial. Sedangkan dibandingkan dengan target dalam Renstra yaitu sebanyak 1.080 jiwa atau dengan capaian 105,37 %, capaian tahun 2017 pada indikator ini melampaui target yang ditetapkan.

3. **Indikator ketiga**, Persentase PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, capaian kinerja



dengan indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Dibandingkan capaian tahun 2016 yakni sebesar 1,60 % maka tahun 2017 mengalami kenaikan kinerja sebesar 0,23 %. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur khususnya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta partisipasi pilar-pilar sosial masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Sedangkan dukungan dari Kementerian Sosial melalui pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial telah memberikan dukungan dalam penanganan PMKS melalui kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga / PKH di 38 Kab/Kota.

4. **Indikator keempat**, persentase PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat capaian kinerja dengan indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap /tidak ada perubahan. Dimana pada tahun 2016 (n-1) sebesar 2,90 % dan tahun 2017 (n) sebesar 4,41 % terjadi kenaikan. Hal ini terjadi karena terkait dengan kebijakan penyediaan alokasi anggaran daerah yang dapat mencukupi untuk menangani PMKS sebesar 4,41 % atau 76 orang eks klien UPT yang membutuhkan pengembangan dalam meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar serta mengembalikan kemampuan menjalankan fungsi sosial yang mengalami hambatan.
5. **Indikator kelima**, PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, capaian kinerja dengan indikator ini jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya tetap /tidak mengalami perubahan. Dimana pada tahun 2016 (n-1) sebesar 0,54 % (4.845 jiwa) dan tahun 2017 (n) mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,75 % (4.880 jiwa). Hal ini lebih disebabkan karena adanya penggabungan 2 UPT milik Pemerintah Daerah Kabupaten (UPT Asuhan Anak Kabupaten Ngawi dan UPT PSTW Kabupaten Pacitan).

- c Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra
- Untuk melihat capaian kinerja selain mengetahui hasil pengukuran 2 (dua) aspek terdahulu, juga dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel : 4  
Perbandingan capaian kinerja sampai akhir periode Renstra

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Kemajuan (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	8,42	8,30	98,57
	% PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0,88	0,17	19,31
	% PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	9,31	1,83	19,65
	% PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang	25,52	4,41	17,28

	meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat			
	% PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	3	0,75	25
JUMLAH		47.13	14,97	31.76

Memperhatikan data sebagaimana tertuang dalam tabel 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran 1 sampai dengan akhir Renstra sebagaimana target yang ditetapkan sebesar 47.13 % dari total populasi PMKS meningkat kesejahteraannya. Tahun 2017 merupakan tahun keempat periode renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 s/d 2019 telah dapat mencapai sebesar 14.97 % dengan kemajuan sebesar 31.76 %. Secara rinci tingkat kemajuan yang dapat dicapai sebagai berikut :

1. **Indikator pertama** : persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat sampai dengan akhir Renstra ditargetkan sebesar 8.42 %, pada tahun 2017 ini tercapai sebesar 8,30 % dengan tingkat kemajuan sebesar 98.57 %.
2. **Indikator kedua** : persentase PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Sampai dengan akhir masa Renstra yakni pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,88 % atau 5.958 orang tercapai sebesar 0,17 % atau 1.138 orang. Dengan tingkat kemajuan sebesar 19.31 % dari target yang ditetapkan.
3. **Indikator ketiga** : persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan

meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Sampai dengan akhir masa Renstra yakni pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,31 % atau 20.720 orang tercapai sebesar 1,83 % atau 2.260 orang. Dengan tingkat kemajuan sebesar 19,65 % dari target yang ditetapkan.

4. **Indikator keempat** : persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Sampai dengan akhir masa Renstra yakni pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 25,52 % atau 440 orang tercapai sebesar 4.41 % atau 76 orang. Dengan tingkat kemajuan sebesar 17.28 % dari target yang ditetapkan.
5. **Indikator kelima** : persentase PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat, sampai dengan akhir Renstra ditargetkan dapat menjangkau PMKS sebanyak 27.612 jiwa atau sebesar 3 %, pada tahun 2016 ini tercapai sebesar 0,75 % dengan tingkat kemajuan sebesar 25 %.

d Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk melihat capaian akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 selain dengan membandingkan capaian pada tahun sebelumnya, juga membandingkan dengan standar nasional. Standar Nasional yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Dimana sampai akhir tahun 2016 SPM bidang sosial masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SPM Bidang Sosial yang masih dalam tahap pembahasan dengan DPR RI. Dengan demikian pembandingan capaian kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur dengan standar nasional yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan SPM, dan

Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM. Selain itu juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan masa berlaku tahun 2008 s/d 2015 dengan salah satu pelayanan dasar yaitu Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial dengan indikator Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE & PKH) Untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial serta program kesejahteraan lainnya Untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil penghitungan capaian kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tabel 5 berikut :

Tabel 5  
PERBANDINGAN DENGAN STANDAR NASIONAL

PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET (%)	CAPAIAN			
			2017 (%)	KEMAJUAN (%)	2016-2017	KEMAJUAN (%)
Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi	1. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE & PKH) Untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	26,32	32,90	26,34	32,92
	2. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial serta program	80	1,29	1.61	2,54	3.17 %

	kesejahteraan lainnya Untuk pemenuhan kebutuhan dasar					
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa dibandingkan dengan standar nasional (SPM bidang Sosial) capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2017 dengan indikator Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE & PKH) Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, target 80 % terealisasi sebesar 26,32 % dengan kemajuan 32,90 %. Sedangkan capaian kinerja dengan indikator Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial serta program kesejahteraan lainnya Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, target 80 % terealisasi sebesar 1.29 % dengan kemajuan sebesar 2,54 %.

e Analisis Penyebab Kenaikan dan Penurunan Kinerja

1. Penyebab kenaikan kinerja

Memperhatikan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada bab terdahulu dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang meningkat kinerjanya dan ada juga yang tetap bila di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu seperti :

- Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani Permasalahan Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) seperti program prioritas Gubernur Jawa Timur dan program ad hoc;
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- Dukungan sarana dan prasarana pelayanan pada PMKS walaupun masih membutuhkan revitalisasi.
- Pelimpahan P3D dari UPT milik Pemerintah Daerah Kabupaten

## 2. Penyebab Penurunan Kinerja

Ada pula capaian kinerja yang mengalami penurunan, hal ini karena adanya kenaikan jumlah PMKS rumpun Rehabilitasi Sosial, alokasi anggaran, sehingga sasaran diturunkan dibanding tahun 2016.

## 3. Alternatif Solusi Yang dilakukan

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah :

- Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait dengan penentuan kebijakan penanganan PMKS;
- Melakukan konsolidasi dan meningkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun dengan Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan penanganan PMKS;

## f Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber dana yaitu dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, sebagaimana dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel : 6

### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	94,09	81.46	12.63
		% PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya	100	99,69	0,31

		dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat			
		% PMKS Penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	100	99.38	0.62
		% PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	100	98,12	1,88
		% PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	100	94.32	5.68

Berdasarkan data pada tabel 6 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indikator pertama** : persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 94,09 %, dan penyerapan anggaran sebesar 81.46 %, maka kinerja dengan indikator tersebut dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi kinerja **sebesar 12.63**.
2. **Indikator kedua** : persentase PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 99,69 %, maka jika dilihat dari efisiensi



sumber dana masuk kategori "**efisien**". Tingkat efisiensi kinerja adalah **sebesar 0,31**.

3. **Indikator ketiga** : persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan perlindungan sosial yang terlindungi, meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran sebesar 99.38 %, maka kinerja dengan indikator tersebut dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi capaian kinerja adalah **sebesar 0.62**.
4. **Indikator keempat** : persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran sebesar 98,12 %, maka kinerja dengan indikator tersebut dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi capaian kinerja adalah **sebesar 1,88**.
5. **Indikator kelima** : persentase PMKS Penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 % dengan penyerapan anggaran sebesar 94.32 %, maka kinerja dengan indikator tersebut dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi capaian kinerja adalah **sebesar 5.68**.

g Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Adapun pencapaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana terurai diatas dapat dicapai dengan dukungan implementasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial, didukung dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
  - b. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
  - c. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Klien Fakir Miskin

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penanganan Lanjut Usia Telantar
  - b. Penanganan Dampak Sosial HIV/AIDS
  - c. Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
  - d. Pelayanan Sosial bagi Anak
  - e. Penanganan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP
  - f. Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga
  - g. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Klien Anak Jalanan
3. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, didukung dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Sumber Kesejahteraan Sosial
  - b. Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar
  - c. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - d. Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah.
4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, didukung dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kesiap-siagaan penanggulangan bencana Berbasis Masyarakat
  - b. Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana
5. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial, didukung dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial
  - b. Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
  - c. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Eks Klien
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial, didukung dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang
- b. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Balita Sidoarjo
- c. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Netra
- d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Trenggalek
- e. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Situbondo
- f. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Sumenep
- g. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak Nganjuk
- h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Petirahan Anak Batu
- i. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Jombang
- j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar Blitar
- k. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Pasuruan
- l. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Blitar
- m. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jombang
- n. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Magetan
- o. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Tubuh Pasuruan

- p. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Grahita Tuban
- q. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Rungu Wicara Pasuruan
- r. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Pasuruan
- s. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik Kediri
- t. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Pasuruan
- u. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Sidoarjo
- v. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun
- w. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban
- x. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Tuna Susila Kediri
- y. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya
- z. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Bojonegoro
- aa. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja Pamekasan
- bb. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Jember
- cc. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Banyuwangi
- dd. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Bondowoso

- ee. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang
- ff. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang
- gg. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar
- hh. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro
- ii. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan
- jj. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan
- kk. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara Pasuruan
- ll. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Madiun
- mm. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Pasuruan
- nn. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban
- oo. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri
- pp. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya
- qq. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo

## **2. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberi pertolongan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka

memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam rangka memulihkan fungsi sosialnya yang terganggu juga ditujukan dalam rangka peningkatan keberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Paparan berikut akan menjelaskan akuntabilitas kinerja sasaran meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

a Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja sasaran "meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel : 7  
Pencapaian Kinerja

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,39	15,39	100

Berdasarkan data pada tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indikator persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 2.454 PSKS atau 15,39 % dari populasi PSKS sebanyak 16.033 PSKS. Capaian kinerja ini sebesar 100 % dari target yang ditetapkan atau kategori **baik**. Capaian kinerja tersebut melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

b Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada sasaran kedua ini juga dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan hasil sebagaimana pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel : 8  
Perbandingan Capaian Kineja

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	
			Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)
Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,39	15,39	15,39

Memperhatikan data pada tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan tahun 2016 capaian kinerja tahun 2017 ini tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar 15,39 % atau sebanyak 2.454 PSKS mendapatkan pembinaan peningkatan pelayanan sosial pada PMKS dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian kinerja tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, hal ini disebabkan karena pengalokasian anggaran pada program yang mendukung capaian kinerja sasaran ini tidak mengalami kenaikan.

C Perbandingan Capaian Kinerja s.d. akhir periode Renstra

Terhadap tujuan yang akan dicapai yaitu target capaian kinerja sampai dengan akhir periode, hasil pengukuran kinerja sebagaimana termuat dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel : 9  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. akhir periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	69,2	15,39	22,12

Berdasarkan data pada tabel 9 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran kedua diatas dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra yakni sebesar 69,2 %, maka capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 15,39 % dengan tingkat kemajuan sebesar 22,21 %.

b. Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel : 10  
ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN (%)
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.540.000.000	1,67

Berdasarkan data pada tabel 10 dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber



Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebesar Rp. 1.540.000.000,- atau 1,67 % dari total Belanja Langsung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 101.757.506.900,-.

c. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran dapat dilihat dengan membandingkan pencapaian target kinerja dengan realisasi anggaran, sebagaimana termuat dalam tabel 11 di bawah.

Tabel : 11  
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,39	15,39	100	1.540.000.000	1.453.703.725	94,40

Berdasarkan data pada tabel 11 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indikator persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebesar 15,39 % dari populasi PSKS sebanyak 16.033 PSKS. Capaian kinerja ini sebesar 100 %. Capaian kinerja tersebut melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial didukung dengan alokasi anggaran sebesar 1.540.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.453.703.725,- atau 94,40 %.

d. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta solusi

Pencapaian Kinerja terkait dengan meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena adanya komitmen dan kebijakan penguatan/pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas

Sosial Provinsi Jawa Timur. Disisi lain juga disebabkan karena adanya koordinasi yang intens antara PSKS sebagai sasaran dengan Dinas Sosial sebagai pembina. Namun upaya penguatan komitmen dan koordinasi harus secara terus menerus dilakukan. Melihat hasil pengukuran kinerja sasaran 2 ini sebagaimana pada tabel 8 diatas, tidak mengalami peningkatan/ tetap, hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia tidak mengalami kenaikan, sehingga sasaran program jika dibanding tahun lalu (2016) tetap yaitu untuk mendukung penanganan sebanyak 2.467 PSKS hingga potensi sumber tersebut aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Salah satu aspek yang digunakan untuk melihat akuntabilitas capaian kinerja sasaran adalah efisiensi penggunaan sumber dana yaitu dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran. Tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel : 12

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	94,40	5,60

Berdasar data hasil pengukuran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber dana sebagaimana pada tabel 12, dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dikategorikan **efisien**. Dimana pencapaian kinerja mencapai 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 94,4 % dengan tingkat efisiensi sebesar 5,6.

f. Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja tersebut dapat dicapai dengan implementasi program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 13 berikut :

Tabel 13  
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG

PROGRAM	KEGIATAN	KET
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	
	b Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	
	c Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	
	d Pembinaan PUB dan UGB	

Berdasarkan data pada tabel 13 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja terkait dengan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercapai dengan implementasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang didukung dengan 3 kegiatan yaitu Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dan Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>101,757,506,900.00</b>	<b>94,817,070,512.00</b>	<b>93.18</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,031,620,960.00</b>	<b>4,776,403,677.00</b>	<b>94.93</b>
1	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	5,031,620,960.00	4,776,403,677.00	94.93
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>8,875,447,470.00</b>	<b>8,158,277,307.00</b>	<b>91.92</b>
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	5,329,201,470.00	4,931,222,632.00	92.53
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	3,546,246,000.00	3,227,054,675.00	91.00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>8,319,569,290.00</b>	<b>7,406,079,285.00</b>	<b>89.02</b>
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	719,350,000.00	655,667,606.00	91.15
2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	7,600,219,290.00	6,750,411,679.00	88.82
<b>4</b>	<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>1,206,188,180.00</b>	<b>1,116,723,934.00</b>	<b>92.58</b>
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	491,880,000.00	475,638,519.00	96.70
2	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	378,608,960.00	337,510,950.00	89.14
3	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	335,699,220.00	303,574,465.00	90.43
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2,360,000,000.00</b>	<b>2,264,232,925.00</b>	<b>95.94</b>
1	<i>Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</i>	1,475,000,000.00	1,410,922,905.00	95.66
2	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</i>	300,000,000.00	293,836,650.00	97.95
3	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat</i>	585,000,000.00	559,473,370.00	95.64
<b>6</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>9,210,000,000.00</b>	<b>7,502,302,898.00</b>	<b>81.46</b>
1	<i>Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin</i>	5,000,000,000.00	3,561,236,423.00	71.22
2	<i>Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Klien Fakir Miskin</i>	4,210,000,000.00	3,941,066,475.00	93.61
<b>7</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>4,775,000,000.00</b>	<b>4,760,406,600.00</b>	<b>99.69</b>

1	<i>Penanganan Lanjut Usia Telantar</i>	600,000,000.00	598,450,600.00	99.74
2	<i>Penanganan Dampak Sosial HIV/AIDS</i>	250,000,000.00	245,997,675.00	98.40
3	<i>Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas</i>	550,000,000.00	547,903,460.00	99.62
4	<i>Pelayanan Sosial bagi Anak</i>	625,000,000.00	623,673,185.00	99.79
5	<i>Penanganan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP</i>	550,000,000.00	548,047,010.00	99.64
6	<i>Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga</i>	1,400,000,000.00	1,397,358,820.00	99.81
7	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi klien Anak Jalanan</i>	800,000,000.00	798,975,850.00	99.87
8	<b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>	<b>1,330,000,000.00</b>	<b>1,321,807,595.00</b>	<b>99.38</b>
1	<i>Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar</i>	650,000,000.00	649,599,094.00	99.94
2	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</i>	680,000,000.00	672,208,501.00	98.85
9	<b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>	<b>3,325,000,000.00</b>	<b>3,290,035,405.00</b>	<b>98.95</b>
1	<i>Kesiap-siagaan penanggulangan bencana Berbasis Masyarakat</i>	3,075,000,000.00	3,058,441,405.00	99.46
2	<i>Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana</i>	250,000,000.00	231,594,000.00	92.64
10	<b>Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>4,023,340,000.00</b>	<b>3,947,774,965.00</b>	<b>98.12</b>
1	<i>Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial</i>	2,548,340,000.00	2,492,971,810.00	97.83
2	<i>Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial</i>	730,000,000.00	727,941,045.00	99.72
3	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Eks Klien</i>	745,000,000.00	726,862,110.00	97.57
11	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial</b>	<b>53,301,341,000.00</b>	<b>50,273,025,921.00</b>	<b>94.32</b>
1	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang</i>	1,120,600,000.00	1,111,512,530.00	99.19
2	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo</i>	1,935,050,000.00	1,872,378,511.00	96.76
3	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra</i>	1,258,500,000.00	1,220,610,779.00	96.99

4	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek</b>	1,990,400,000.00	1,888,391,550.00	94.87
5	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo</b>	1,733,000,000.00	1,709,329,060.00	98.63
6	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep</b>	1,659,000,000.00	1,617,105,300.00	97.47
7	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk</b>	2,031,250,000.00	1,875,897,690.00	92.35
8	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu</b>	1,413,000,000.00	1,327,888,760.00	93.98
9	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang</b>	1,148,400,000.00	1,047,442,409.00	91.21
10	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar</b>	954,000,000.00	899,910,551.00	94.33
11	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan</b>	2,198,100,000.00	2,022,850,200.00	92.03
12	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar</b>	1,700,750,000.00	1,575,061,079.00	92.61
13	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang</b>	1,872,870,000.00	1,865,796,220.00	99.62
14	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan</b>	1,797,050,000.00	1,665,947,150.00	92.70
15	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan</b>	887,100,000.00	812,933,054.00	91.64
16	<b>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban</b>	1,196,800,000.00	1,139,957,650.00	95.25
17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor	39,200,000.00	39,045,600.00	99.61
18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor	39,200,000.00	39,045,600.00	99.61
19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio			

		5,700,000.00	5,643,000.00	99.00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,700,000.00	5,643,000.00	99.00
21	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan</i>	988,800,000.00	941,307,420.00	95.20
22	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan</i>	3,255,100,000.00	2,987,367,660.00	91.77
23	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri</i>	2,695,000,000.00	2,607,159,140.00	96.74
24	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan</i>	1,084,170,000.00	974,610,700.00	89.89
25	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalan Sidoarjo</i>	2,016,200,000.00	1,801,756,957.00	89.36
26	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun</i>	1,174,301,000.00	1,064,076,434.00	90.61
27	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban</i>	1,335,200,000.00	1,235,993,221.00	92.57
28	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri</i>	1,027,500,000.00	969,823,190.00	94.39
29	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan Rehabilitasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya</i>	1,254,550,000.00	1,169,836,910.00	93.25
30	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro</i>	946,000,000.00	861,855,100.00	91.11
31	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan</i>	1,178,000,000.00	1,100,175,336.00	93.39
32	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember</i>	1,697,600,000.00	1,568,272,235.00	92.38
33	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi</i>	1,225,300,000.00	1,143,084,964.00	93.29
34	<i>Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemenuhan Pelayanan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso</i>	1,482,750,000.00	1,385,756,040.00	93.46

35	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang</i>	245,000,000.00	238,297,170.00	97.26
36	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang</i>	920,000,000.00	868,568,277.00	94.41
37	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</i>	22,458,000.00	22,373,826.00	99.63
38	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</i>	22,458,000.00	22,373,826.00	99.63
39	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar</i>	665,000,000.00	618,696,175.00	93.04
40	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Bojonegoro</i>	700,000,000.00	662,705,519.00	94.67
41	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan</i>	815,000,000.00	771,042,850.00	94.61
42	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan</i>	400,000,000.00	395,651,815.00	98.91
43	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu Wicara Pasuruan</i>	360,000,000.00	353,151,900.00	98.10
44	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Madiun</i>	375,000,000.00	372,595,300.00	99.36
45	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Pasuruan</i>	400,000,000.00	396,592,500.00	99.15
46	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban</i>	250,000,000.00	248,609,350.00	99.44
47	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri</i>	965,000,000.00	962,228,320.00	99.71
48	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya</i>	800,000,000.00	771,420,100.00	96.43
50	<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo</i>	150,000,000.00	149,378,845.00	99.59



#### 4 MANFAAT PENERAPAN SAKIP

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki manfaat positif bagi lembaga, hal ini teridentifikasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan SAKIP.

Adapun manfaat penerapan SAKIP sebagai berikut

##### a Sebelum Penerapan SAKIP

1. Evaluasi Kinerja belum dapat dilihat secara khusus, hanya dilihat dari penyerapan anggaran
2. Tujuan, sasaran kinerja kurang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan bidang tugas
3. Tidak adanya keselarasan sasaran yang dijadikan komitmen penyelenggara pemerintah bidang sosial

##### b Setelah Penerapan SAKIP

Adapun manfaat setelah penerapan SAKIP Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat digunakan :

1. Sebagai alat evaluasi lembaga
2. Dapat digunakan untuk melihat dan menilai hasil kinerja yang diperjanjikan
3. Menyusun bahan masukan penyempurnaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan komitmen penyelenggara program kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial
6. Memperjelas tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial